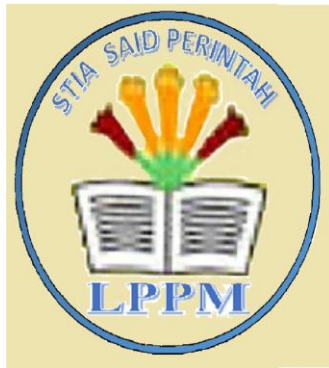


---

# Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 10 - 30

Accepted; 2023 - 11 - 28

Published; 2023 - 11 - 30



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijaksaidperintah>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## Implementasi Kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)

Yohanna Christiani Lorenza <sup>1)</sup>  
Ertien Rining Nawangsari <sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur  
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
[yohannachristianilorenza@gmail.com](mailto:yohannachristianilorenza@gmail.com)

### Abstract

The Jatim Puspa Program is an effort made by the East Java Provincial Government to increase the income of people affected by COVID-19 with a target for people who are at the lowest 8-12% welfare level. Batu City is the only city in East Java Province that receives assistance from the Jatim Puspa Program targeting 123 Beneficiary Families (KPM) spread across 6 villages, one of which is Gunungsari Village. The aim of this research is to analyze and describe the implementation of the East Java Puspa Program policy in Gunungsari Village, Batu City. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis model consists of data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions. The research results show that the Policy Content and Policy Context in the Jatim Puspa Program in Gunungsari Village, Batu City can be said to have been successful, but there are still targets that need to be optimized again. However, overall the implementation policy of the Jatim Puspa Program in Gunungsari Village, Batu City has been carried out well.

Keywords : Public Policy, Program Implementation, Business Empowerment, Jatim Puspa

## Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, muncul penyakit menular yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Adanya COVID-19 menyebabkan banyak tenaga kerja yang diberhentikan dari perusahaan sehingga sektor perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh (Silaban et al., 2020). Para tenaga kerja tersebut mayoritas bekerja pada perusahaan di bidang industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Kadir, 2022). Tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang terdampak pandemi COVID-19 akan memiliki permasalahan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan (Budiarti, 2020).

Menurut data dari BPS Jawa Timur, (2020) prosentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,37% dan pada periode bulan September 2019 hingga bulan September 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,26%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

### Data Prosentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur



Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2022)

Angka kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur menjadi permasalahan yang serius bagi Pemerintah. Kota Batu merupakan Kabupaten/Kota dengan prosentase penduduk miskin (P0) terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021. Data prosentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021 berdasarkan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

### Penduduk Miskin Terendah (P0) di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin Terendah di Provinsi Jawa Timur (Persen)	
		2020	2021
1.	Kota Batu	3,89	4,09
2.	Kota Malang	4,44	4,62
3.	Kota Madiun	4,98	5,09
4.	Kota Surabaya	5,02	5,23
5.	Kabupaten Sidoarjo	5,59	5,93

Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada tahun 2020 penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 3,89% dan naik sebanyak 0,29% di tahun 2021 sehingga menjadi 4,09%. Sehingga angka kemiskinan di Kota Batu lebih rendah dari prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021). Adanya permasalahan tersebut menjadikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah lainnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa program pemerintah salah satunya Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).

Program Jatim Puspa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdampak serta dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosialnya (Nuryana, 2022). Program ini memiliki sasaran yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada tingkat kesejahteraan 8-12% terendah. Terdapat beberapa bentuk bantuan yang diberikan, diantaranya barang penunjang usaha, pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas pemasaran produk, menciptakan jaringan usaha, melibatkan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk ikut serta memberdayakan KPM dan lain sebagainya (Maulana, 2021).

Kota Batu merupakan salah satu Kota sebagai KPM yang menerima Program Jatim Puspa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 123 KPM yang tersebar di 6 (enam) desa, salah satu desa tersebut yaitu Desa Gunungsari. Desa Gunungsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumiaji yang memiliki 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Pagergunung, Dusun Kapru, Dusun Brumbung, Dusun Jantur dan Dusun Brau. Luas wilayah Desa Gunungsari sebesar 318,833 Ha. Terdapat beberapa KPM

di Desa Gunungsari yang belum memiliki usaha sehingga pendamping desa harus memberikan pengertian mengenai pentingnya usaha agar KPM tersebut bersedia untuk menerima bantuan Program Jatim Puspa dan memulai untuk membuka usaha. Namun, terdapat beberapa KPM yang tidak bersedia untuk membuka usaha dikarenakan sudah lanjut usia sehingga KPM tersebut tidak dapat menerima bantuan Program Jatim Puspa.

Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Jawa Timur yang menyatakan bahwa Program Jatim Puspa diadakan untuk meningkatkan pendapatan dari KPM guna memulihkan perekonomian. Hal tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle dalam Anggara, (2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang menganalisis dampak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang pertama yaitu dari Sasmito & Nawangsari, (2019) membahas tentang implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Batu serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Lalu terdapat penelitian terdahulu yang lainnya oleh Chasanah et al., (2021) yang menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya di era adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya penelitian terdahulu berikutnya dari Nuryana, (2022) yang menganalisis tentang efektivitas dan kendala selama pemberian bantuan Program Jatim Puspa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yang pertama terletak pada Program Pemerintah dimana penelitian yang pertama membahas PKH, sedangkan penelitian terdahulu yang kedua terdapat perbedaan pada lokus penelitian yang dimana penelitian terdahulu yang kedua berada di Kota Surabaya. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokus penelitian dan teori yang digunakan, dimana untuk lokus penelitian terdahulu yang ketiga berada di Kabupaten Ponorogo dan menggunakan teori dari Budiani, sedangkan penelitian ini berada di Kota Batu dan menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Adanya perbedaan-

perbedaan tersebut merupakan suatu kebaruaran kajian yang akan dijabarkan pada penelitian ini.

Berdasarkan beberapa kondisi yang sudah dijelaskan tersebut memberikan gambaran bahwa Kota Batu merupakan satu-satunya Kota yang memiliki Desa di Provinsi Jawa Timur dan menerima bantuan Program Jatim Puspa. Kota Batu mengalami kontraksi ekonomi terdalam di Provinsi Jawa timur pada tahun 2020. Akan tetapi, Kota Batu termasuk memiliki prosentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021 serta angka penduduk miskin di Kota Batu yang lebih rendah dari angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pemaparan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Desa Gunungsari Kota Batu.

## **Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian**

### **Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)**

Program Jatim Puspa merupakan rancangan dari berbagai program pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Program Jatim Puspa dimaksudkan sebagai program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM. Program ini memberikan fasilitasi bantuan dan pendampingan yang tersebar di 30 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 15 kabupaten kantong kemiskinan dan diperluas dengan tambahan 15 kabupaten diluar kantong kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan yang telah memiliki usaha atau akan memulai usaha dari;

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi (Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah) Program Keluarga Harapan;
- b. KPM pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi.

## Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam Anggara, (2014) mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan akan bergantung pada Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Isi kebijakan (*Content of Policy*) yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah (1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program; (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) Jangkauan perubahan yang diinginkan; (4) Kedudukan pengambil keputusan; (5) Pelaksana program; (6) Sumber daya yang disediakan. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi yaitu (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu. Penarikan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih sampel atau informan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Informan kunci (*key informan*) pada penelitian ini yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu. Selain itu, terdapat informan pendukung antara lain Tim Koordinasi Desa (TKD) dan KPM Desa Gunungsari. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Wijaya, (2018) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing and verifying*).

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Program Jatim Puspa dimulai pada tahun 2020 yang memiliki fokus program untuk meningkatkan pendapatan pasca COVID-19 dengan sasaran anggota rumah tangga perempuan yang telah memiliki usaha atau akan memulai suatu usaha. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari yang mana Desa Gunungsari merupakan salah satu dari enam desa di Kota Batu yang menerima manfaat Program Jatim Puspa. Keberhasilan implementasi program ini dilihat dari dua variabel yakni variabel Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan variabel Konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pada implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu yang mana diharapkan program ini dapat meningkatkan pendapatan KPM dan memulihkan perekonomian.

### **Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Adanya Program**

Menurut Grindle dalam Anggara, (2014) bahwa kebijakan yang memberikan keuntungan kepada semua pihak membuat implementasinya lebih mudah tanpa menimbulkan perlawanan dari yang kepentingannya dirugikan. Istiqlalia, (2018) menekankan pentingnya partisipasi aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda dalam mendukung kebijakan. Dalam implementasi Program Jatim Puspa, fokus pada keuntungan bagi seluruh aktor yang terlibat untuk mencegah perlawanan dan kerugian. Analisis penulis menunjukkan bahwa pihak terlibat memiliki kepentingan sesuai tugas dan fungsi instansi dan kesinambungan antar instansi penting untuk keuntungan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Theodore Lowi yang dikutip dari Wiratawang, (2018) yang menekankan perlunya pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan lembaga.

DP3AP2KB Kota Batu menerangkan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dari program ini banyak pihak yang diuntungkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda sebagai berikut;

*"Tidak ada, malah lebih banyak yang diuntungkan karena Program Jatim Puspa itu kan harus pemberdayaan usaha di sekitar kayak orang jualan bakso gitu ya bahan-bahannya bakso itu beli di toko sekitar. Keuntungannya ya berkurang, data kemiskinannya berkurang"* (Hasil wawancara, 30 Maret 2023).

Pemerintah Desa Gunungsari dan KPM berpendapat bahwa dalam implementasi program tidak terdapat pihak yang dirugikan. Pihak-pihak tersebut mendukung Program Jatim Puspa karena dapat meningkatkan ekonomi dari KPM. Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Mohammad Faiqul Ihsan, SS selaku Tim Koordinasi Desa Gunungsari bahwa;

*"InsyaAllah gak ada pihak yang dirugikan mbak karena kan kadang orang itu dapat bantuan kan secara perasaan tersinggung tapi mereka dengan senang hati menerima bantuan itu"* (Hasil wawancara 17 April 2023).

### **Freezer dari Bantuan Program Jatim Puspa**



Sumber; Dokumentasi peneliti, (2023)

Implementasi Program Jatim Puspa memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Gunungsari melalui relasi dengan pedagang. KPM merasakan manfaat usaha, pemerintah desa menjalin komunikasi intensif, dan instansi lain seperti DP3AP2KB Kota Batu dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengimplementasikan visi dan misi program yang sejalan dengan penelitian Khusufmawati et al., (2021), memudahkan implementasi tanpa menimbulkan perlawanan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu memberikan keuntungan melalui komunikasi dan koordinasi yang harmonis.

### **Jenis Manfaat yang akan Dihasilkan**

Kebijakan yang mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran cenderung lebih mudah diimplementasikan, sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Grindle dalam Anggara, (2014). Keberhasilan implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu terkait dengan dampak positif yang dirasakan oleh KPM. Sesuai dengan pandangan Mustari, (2015) bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tergantung



pada kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Program Jatim Puspa berhasil mencapai tujuannya dengan memberikan dampak positif kepada KPM yang sebelumnya tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Melalui program ini, KPM dapat menghasilkan pendapatan melalui usaha dan bantuan yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE bahwa;

*"Pasti dukung, beberapa ada yang menolak untuk membuka usaha tetapi kita kasih pengertian"* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Theodore Lowi yang dikutip dari Wiratawang, (2018) menjelaskan bahwa jenis manfaat yang dihasilkan dalam suatu kebijakan harus terdapat manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh kelompok sasaran sebagai hasil dari kebijakan tersebut sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari kelompok sasaran. Selaras dengan pendapat tersebut terdapat temuan dimana beberapa KPM kurang tertarik untuk membuka usaha karena hanya menginginkan bantuan berupa uang. Namun, setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi, KPM menjadi lebih mengerti dan mendukung Program Jatim Puspa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mohammad Faiqul Ihsan, SS. Bahwa;

*"Jadi gini mungkin sebelum sosialisasi dengan kita ini memang awalnya separo dari mereka itu mungkin kurang tertarik karena kebanyakan orang kalo dapet bantuan kan pengennya fresh money ya mbak uang tapi yang mereka dapatkan berupa barang untuk usaha akhirnya kita melakukan pendampingan pemahaman sosialisasi akhirnya mereka juga bisa menerima bahwa dalam usaha itu tidak harus butuh modal uang saja tapi juga penunjang alat-alat yang dibutuhkan ketika mereka memulai usaha begitu"* (Hasil wawancara 17 April 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu menjadi penentu terhadap arah berjalannya program tersebut. Hal ini didukung oleh temuan dari Melani Sahputri & As'ari, (2021) yang menjelaskan bahwa kekuasaan dan kepentingan merupakan sebuah aspek yang bisa menunjukkan ke arah mana implementasi itu berjalan karena pada suatu kebijakan terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang beragam. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam implementasi Program Jatim Puspa cukup mudah dilaksanakan karena memberikan manfaat dan dampak positif seperti dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan KPM. Namun dalam

pelaksanaannya perlu dilakukan survey dan sosialisasi lebih lanjut agar KPM program tepat sasaran dan implementasi program berhasil.

### **Jangkauan Perubahan yang Diinginkan**

Menurut Grindle dikutip Anggara, (2014) bahwa jangkauan perubahan yang diinginkan merupakan perubahan yang besar dan luas dari kebijakan tersebut sehingga bisa dipahami jika semakin luas jangkauan kebijakan maka akan semakin sulit untuk dilaksanakan. Kebijakan Program Jatim Puspa berfokus pada kondisi KPM pada saat sebelum dan setelah adanya Program Jatim Puspa sehingga dapat dilihat manfaat dalam meningkatkan pendapatan KPM. Program ini memberikan manfaat kepada KPM dimana terdapat peningkatan usaha KPM dari sebelum adanya Jatim Puspa dan setelah adanya kebijakan tersebut. Usaha yang telah ada dibantu oleh Pemerintah agar dapat mencapai tahap kemandirian, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE bahwa;

*"Perubahan yang diinginkan kalo kalo Pemerintah sih tambahan anggaran jadi kayak lebih dia ini sudah dapet 2,5 juta untuk produksi ini nah pinginnya itu tahun depan itu dikasih lagi. Misal dia itu jualan apa gitu ya kayak kemarin itu ada yang jualan rujak awalnya, kita kasih bantuan itu dikembangkan akhirnya ada tambahan kayak rinso, shampo. Kan namanya usaha itu gak lancar terus ya, maunya ada bantuan kayak gitu. Sing rugi itu ada juga tapi Alhamdulillahnya masih bertahan semua maksude itu gak sampe barang habis terus gak bisa muter lagi itu gak sampe kayak gitu"* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu memiliki keberlanjutan modal dan usaha dari KPM. Namun, di sisi lain terdapat usaha yang stagnan dan cenderung belum mengalami perubahan karena kurangnya pengetahuan sumber daya pedagang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sasmito & Nawangsari, (2019) bahwa sumber daya yang memadai merupakan sarana pendukung, pendampingan dan penyuluhan dapat mendorong potensi dan memberikan manfaat. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan agar KPM dapat memiliki pengetahuan dan dasar berdagang yang merupakan kunci utama agar modal yang diberikan dari Program Jatim Puspa dapat sesuai dengan jangkauan implementasi yang diinginkan. Keterangan ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mohammad Faiqul Ihsan, SS bahwa;

*"Ada KPM yang menurun dari usahanya itu tadi ya mungkin ada faktor lain. Dia kan pedagang kalo tidak punya dasar untuk berdagang jadinya kan keuntungan*

*yang didapat kecil sekali dalam jangka waktu yang lama kan dia gak bisa bertahan” (Hasil wawancara pada 17 April 2023).*

Kepastian akan keberlanjutan anggaran juga menjadi perhatian khusus dari DP3AP2KB Kota Batu. Pergantian jabatan Gubernur Jawa Timur dan berakhirnya masa Pandemi COVID-19 juga patut menjadi perhatian terhadap jangkauan perubahan kebijakan program agar manfaat yang telah diterima dari program dapat berlanjut untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Karena dengan adanya derajat perubahan yang ingin dicapai akan berpengaruh pada pengimplementasian suatu kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai dapat dijadikan suatu acuan dalam suatu kebijakan (Istiqlalia, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi Program Jatim Puspa telah menunjukkan kesesuaian dan telah mencapai jangkauan yang diinginkan yaitu peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha KPM.

### **Kedudukan Pengambil Keputusan**

Merilee S. Grindle dalam Anggara, (2014) menyatakan bahwa semakin tersebarnya kedudukan pengambil keputusan maka kebijakan tersebut akan semakin sulit diimplementasikan karena melibatkan beberapa instansi. Namun pada intinya, sebuah implementasi kebijakan bukan dari seberapa banyak instansi yang terlibat, melainkan lebih cenderung pada kejelasan peran dan fungsi (Budiningsih, 2017).

### **Sosialisasi Program Jatim Puspa Tahun 2021**

#### **Kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur**



Sumber; Akun Resmi Instagram DPMD Provinsi Jawa Timur, (2023)

Program Jatim Puspa melibatkan beberapa instansi yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Gunungsari. Meskipun jumlah instansi yang terlibat cukup banyak, namun tidak ada kendala selama pelaksanaan Program Jatim

Puspa berlangsung. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Mohammad Faiqul Ihsan, SS bahwa;

*"Kalo kami dari Provinsi dari Pendamping dari Pemerintah Desa ini kan salah satu tugas dari kita selaku lembaga pemerintahan untuk melayani masyarakat, saya kira gak ada kendala"* (Hasil wawancara 17 April 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tertata rapi sehingga Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Gunungsari telah paham dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 serta adanya sosialisasi bagi pelaksana program dan KPM Program di Desa Gunungsari Kota Batu. Dengan adanya sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan (Dian Herdiana, 2018).

Dapat diketahui bahwa kedudukan implementasi kebijakan Jatim Puspa sudah tepat dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 sehingga seluruh instansi yang terlibat tidak memiliki kendala selama pelaksanaan Program Jatim Puspa. Hasil penelitian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusufmawati et al., (2021) dimana harus dilakukan penatausahaan dan pengelolaan apabila menunjukkan indikasi adanya penyimpangan atau ketidaktepatgunaan sasaran.

### **Pelaksana Program**

Pelaksana program harus memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan agar dapat meningkatkan keberhasilan implementasi program S. Grindle dikutip dalam Anggara, (2014). Demi mencapai keberhasilan program, perlu adanya tim pelaksana program yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan program yang dijalankan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dengan kompetensi setiap pegawai yang ada, dalam hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan suatu program kebijakan (Rohida, 2018). Dengan pelaksana program yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik, maka tingkat keberhasilan implementasi program akan meningkat. Berdasarkan pernyataan Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE bahwa;

*"Kalau pelaksanaan Program Jatim Puspa dari awal sampe akhir itu sudah sesuai PTO semua. Sejak awal mulai sosialisasi sampai terakhir laporan"*

*pertanggungjawaban ke Provinsi itu kita sudah sesuai semua”* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Pelaksana Program Jatim Puspa merupakan *stakeholder* dan KPM Desa Gunungsari. Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu telah dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan pernyataan Bapak Mohammad Faiqul Ihsan, SS bahwa;

*"Pelaksana program Jatim Puspa sudah sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Provinsi, kita juga diberikan bukunya, kita waktu itu diundang ke Sidoarjo untuk sosialisasi program ini. Kami Pemerintah Desa sudah mengikuti itu sesuai dengan ketentuan yang sudah mereka tetapkan bahkan timelinenya pun kita juga sudah mengikuti”* (Hasil wawancara 17 April 2023).

Pelaksanaan program ini juga telah berjalan dengan baik dan mendapat respon yang positif dari KPM. Berhasilnya implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu telah didukung dengan kompetensi pelaksana program yang sudah kompeten dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya PTO dan kompetensi pelaksana program yang sudah kompeten berdampak pada berhasilnya implementasi program Jatim Puspa. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Mauliddia & Hertati, (2023) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program harus memiliki pembagian tugas secara jelas karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan. Sehingga Pelaksana Program Jatim Puspa telah memiliki pemahaman tentang Program Jatim Puspa, memahami PTO, memiliki keahlian dalam administrasi, komunikasi, koordinasi dan memiliki kemampuan kecakapan dalam berinteraksi.

### **Sumber Daya yang Disediakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan atau program Pemerintah, sumber daya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi program. Menurut Grindle dikutip dalam Anggara, (2014) bahwa kecukupan pada sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Bantuan Program Jatim Puspa diberikan kepada KPM dalam bentuk barang dan perbantuan dalam menetapkan strategi seperti pendampingan usaha oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas pemasaran produk, menciptakan jaringan usaha,

melibatkan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* untuk memberdayakan KPM dan lainnya (Maulana, 2021).

Indikator sumber daya yang disediakan dalam hal ini yaitu sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah yang meliputi anggaran, fasilitas dan hal-hal penunjang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Anggaran dari Program Jatim Puspa telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adapun fasilitas yang mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa disediakan oleh Pemerintah Kota yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Pengalokasian sumber daya dilakukan melalui beberapa tahapan seperti survey dan pertimbangan dari pihak Pemerintah setempat. Hal tersebut diungkapkan Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE bahwa;

*"Itu kan anggarannya dari Provinsi, anggaran itu sudah fasilitas juga sudah. Tiap Desa yang dapat program itu dapat BOP jadi BOP itu bisa dipakai untuk honor tim Desa, bisa dipakai rapat-rapat, terus kalau mau antarjemput barang itu boleh sewa mobil, turun mereka juga dapat uang harian. Kota pun dapat BOP juga tapi kan itu BOPnya untuk sosialisasi memperkenalkan Program itu tadi terus money itu"* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Pendistribusian sumber daya Program Jatim Puspa dianggap tepat sasaran dan dilakukan dengan prosedur yang ketat, seiring dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Kesesuaian ini terlihat dari mayoritas penerima program, yaitu anggota rumah tangga perempuan yang bergerak dalam jenis usaha rumahan. Meskipun bantuan dalam bentuk barang senilai Rp 2.500.000 telah didistribusikan merata kepada KPM, beberapa KPM menyatakan bahwa bantuan tersebut dianggap kurang dan mereka terbuka untuk menerima tambahan atau bantuan tambahan. Hasil penelitian Nuryana, (2022) menunjukkan bahwa bantuan dalam Program Jatim Puspa telah melalui proses survey dan identifikasi usaha masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

### **Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)**

Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu karena pelaksana merupakan individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut.

## **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Merilee S. Grindle dalam Anggara, (2017) bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Karena bagaimanapun baik dan hebatnya sebuah kebijakan dirumuskan, jika tidak diimplementasikan dengan baik maka kebijakan tersebut hanyalah sekedar macan diatas kertas (Sutmasa, 2021).

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian Khusufmawati et al., (2021) yang menyatakan bahwa implementor menjadi pihak yang paling penting dan potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses implementasi. DP3AP2KB Kota Batu menjelaskan bahwa strategi yang digunakan pada pelaksanaan Program Jatim Puspa adalah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Pemerintah Kota Batu hanya sebagai jembatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah desa. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana Eka Putri, SE bahwa;

*"Kita dampingin terus ya sebenarnya kayak semuanya udah dari Provinsi, pendampingan semua kegiatannya dari Provinsi, anggaran juga dari Provinsi, nama-namanya juga dari Provinsi cuma kita ya menjembatani aja Provinsi ke Desanya"* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Pemerintah Kota Batu dan Desa Gunungsari menjalankan Program Jatim Puspa sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa strategi khusus, sejalan dengan penelitian Sopah et al., (2020) yang menyoroti strategi mengikuti kekuasaan yang diberikan. Meskipun demikian, pendekatan fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti disarankan oleh Agustana, (2020) diakui sebagai relevan dengan kondisi lapangan. Dalam implementasi, kekuasaan aktor seperti pemerintah desa dan petinggi desa (Kepala Dusun, Kepala RT dan Kepala RW) berpengaruh besar terutama dalam rapat untuk menentukan KPM Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari.

## **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Menurut Header dalam Rahmi & Jumiaty, (2020) bahwa karakteristik lembaga dan penguasa implementasi adalah Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kebijakan di daerah bersama suatu instansi berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengawasi jalannya

kebijakan di dalam masyarakat. Khusna & Arif, (2020) menyatakan bahwa keberhasilan dari suatu kebijakan tergantung dari karakteristik lembaga.

Priambodo & Rostyaningsih, (2019) berpendapat bahwa karakteristik lembaga dan penguasa berkaitan dengan tujuan, tugas, fungsi, sumber daya yang dimiliki serta posisi dari lembaga tersebut dan bagaimana lembaga tersebut ambil bagian dalam pemecahan konflik didalam proses implementasi kebijakan. Pada indikator ini, Program Jatim Puspa yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap KPM telah berjalan dengan harmonis dikarenakan Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Gunungsari telah sepakat untuk mematuhi aturan sehingga dapat mengikuti arahan dan menjalankan program sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana bahwa;

*"Kalau konflik selama ini gak ada mbak, sudah, sosialisasinya itu kita ke Pak Kadesnya, Pendamping Desa, Bendaharanya jadi semua tim yang terlibat itu semua sudah dikasih pemahaman tentang Jatim Puspa dari pelaksanaannya mereka tinggal jalani jadi gak ada yang pas sudah jalan itu masih bingung. Tapi kalau perangkat Desa sampe Provinsi sudah InsyaAllah paham semua"* (Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Para pelaksana program sudah memahami ketentuan-ketentuan yang ada dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada tim yang terlibat dengan semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. Hal ini sejalan dengan penelitian Febrihanuddin et al., (2020) menyatakan bahwa sosialisasi dapat memiliki manfaat untuk meminimalisir benturan kepentingan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat. Selain dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, pihak Kecamatan, Pendamping dari Kota juga menjadi salah satu keberhasilan dalam implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu.

### **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Menurut Priambodo & Rostyaningsih, (2019), kepatuhan dan daya tanggap merupakan sikap patuh dan ketanggapan atau responsivitas yang dimiliki oleh implementor dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepatuhan para pelaksana program ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh para pelaksana tersebut apakah telah sesuai dengan kebijakan.



Indikator kepatuhan menunjukkan bahwa pelaksana program di Desa Gunungsari Kota Batu telah mematuhi seluruh ketentuan dengan baik. Kepentingan kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa ini juga sejalan dengan penelitian Ayuningtias et al., (2021) yang menekankan bahwa komitmen dari semua *stakeholder* sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Semua pihak terlibat telah berupaya semaksimal mungkin mematuhi aturan dan ketentuan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tutut Indiana bahwa;

*"Pada saat pelaksanaan Program Jatim Puspa ini tambah jadi sodara, jadi antara Pendamping Provinsi Pemerintah Desa Pemerintah Kota itu udah kayak jadi sodara. Jadi tiap saya ke 3 Desa itu kayak ke rumah sendiri. Pendamping Desa pun sama Pendamping Provinsi ke rumah Pak Kades dolen (main) kayak silaturahmi. Nak Deso (di desa) enak orangnya welcome"*(Hasil wawancara 30 Maret 2023).

Terkait interaksi para pelaksana program Jatim Puspa dengan masyarakat sudah sangat interaktif. Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah Desa Gunungsari juga menjalin interaksi dengan baik melalui media sosial maupun secara langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Arif, (2019) yang menjelaskan setiap orang dalam interaksinya dengan lembaga pemberi pelayanan apapun jenis pelayanan itu tentunya berharap adanya interaksi yang berkualitas. KPM mengakui jika para pelaksana program telah cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat. Semangat yang tinggi dan kesadaran sebagai Tim Koordinasi Desa menjadikan pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan baik.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya. Beberapa indikator positif pada model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam Anggara, (2014). Hasil penelitian menyoroti keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung KPM. Secara keseluruhan pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Gunungsari Kota Batu sesuai kebijakan yang ditetapkan dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Desa Gunungsari dan KPM Desa Gunungsari.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut; 1) Diperlukan adanya strategi analisis khusus mengenai pelaksanaan Program Jatim Puspa agar KPM memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya; 2) Adanya survey keberlangsungan usaha masyarakat KPM agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan dan dapat menunjang usaha masyarakat.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Gunungsari sebagai salah satu desa penerima bantuan Program Jatim Puspa di Kota Batu dengan karakteristik khusus sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks yang berbeda. Dalam lingkup penelitian ini yang berfokus pada Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi dalam program Jatim Puspa masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan variabel lain atau pendekatan metodologi yang berbeda untuk memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial. *Locus*, 12(1), 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.288>.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Anggara%2C+Sahya>.
- Arif, L. (2019). Kualitas Pelayanan Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru di Pamekasan. *Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 9(1). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1423/1187>.
- Ayuningtias, I., . S., & Faisol, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.24929/jafis.v2i1.1391>.
- BPS Jawa Timur. (2020). Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2020. *Berita Resmi Statistik*, 40, 1–8. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html>.
- Budiarti, Novi Yulia. (2020). Siasat Pedagang Kaki Lima ditengah Pandemi Covid-19 di Pasar Porong Kabupaten Sidoarjo. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Budiningsih, K. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165–186.

- <https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.165-186>.
- Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2(5). <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/156/296>.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. <https://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>.
- Febrihanuddin, R., Duadji, N., & Fitri Meutia, I. (2020). Manajemen Risiko Kebijakan Infrastruktur Pembangunan di Institut Teknologi Sumatera. *JIP: Jurnal Inovasi Pembangunan*, 8(2), 123–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v8i02.180>.
- Istiqialia, E. (2018). *Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Blitar)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9631/>.
- Kadir, D. (2022). Persepsi Pedagang Asongan Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 di Perempatan Jalan Tol Makassar. *Indonesian Annual Conference Series*. (1). 11–19. <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/551/193>.
- Khusna, A., & Arif, L. (2020). Persepsi Siswa Terhadap Sistem Pembelajaran Daring di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. *Jurnal Sistem Informasi Dan Bisnis Cerdas*. [https://www.researchgate.net/publication/347934399\\_STUDENT\\_PERCEPTION\\_OF\\_ONLINE\\_LEARNING\\_SYSTEM\\_IN\\_SMP\\_MUHAMMADIYAH\\_1\\_SIDOARJO](https://www.researchgate.net/publication/347934399_STUDENT_PERCEPTION_OF_ONLINE_LEARNING_SYSTEM_IN_SMP_MUHAMMADIYAH_1_SIDOARJO).
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2543/1938>.
- Maulana, Y. (2021). *Program Pengentasan Kemiskinan Jatim Puspa*. [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/yoga71449/61c2c14f17e4ac32a147d313/program-pengentasan-kemiskinan-jatim-puspa](https://www.kompasiana.com/yoga71449/61c2c14f17e4ac32a147d313/program-pengentasan-kemiskinan-jatim-puspa).
- Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 303. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8258>.
- Melani Sahputri, & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440).
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi & Evaluasi*

- Kebijakan Publik* LeutikaPrio.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=995643>.
- Nuryana, W. (2022). *Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18307/>.
- Priambodo, A., & Rostyaningsih, D. (2019). Analisis Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24160/21911>.
- Rahmi, H., & Jumiaty, J. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 12–23.  
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.102>.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 6(1).  
<https://fmi.or.id/jmbi/index.php/jurnal/article/view/187/172>.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>.
- Silaban, P. S. M. J., Putra, P. D., & Dilani, E. (2020). Analisis dan Strategi Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Akibat Covid19 di Indonesia. *Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*, 74–85.  
<http://digilib.unimed.ac.id/40560/1/Fulltext.pdf>.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, 2(6), 26–40. <https://doi.org/https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/339/320>.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Research Gate, March*, 1–9. <https://repository.sttjaffray.ac.id/media/publications/269015-analisis-data-kualitatif-model-spradley-07c5c9d0.pdf>.
- Wiratawang, J. T. (2018). *Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kota Malang (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)* [Universitas Muhammadiyah Malang].  
<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/42466>.